

# OPTIMALISASI FUNGSI WEBSITE JDIH

DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TIMUR

NOVEMBER  
2019



# APA ITU WEBSITE?



Menurut Thurlow :

Website adalah sistem dari server komputer yang terkoneksi melalui jaringan internet dan dengannya bisa dilakukan pertukaran data, dan secara formal terbentuk dari suatu bahasa pemrograman HTML (Hypertext Markup Language), Flash, atau Java.



## Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum.

# STANDARDISASI WEBSITE JDIH (PERMENKUM HAM RI 8 2019)

- Nama Domain Merupakan subdomain dari website utama suatu instansi (Ex. Jdih.jatimprov.go.id)
- Memuat logo JDIHN diletakkan pojok kiri atas layar
- Menampilkan link daftar alamat website anggota jaringan yang ada dibawah instansinya.
- Struktur organisasi pengelola JDIHN
- Alamat dan kontak pengelola JDIHN
- Konten dalam website JDIH harus memuat dokumen hukum
- Terdapat menu penelusuran (searching dokumen)
- Terdapat kuisisioner tentang indeks kepuasan pengunjung website JDIH

# STANDARDISASI WEBSITE JDIH (PERMENKUM HAM RI 8 2019)

## Standar Metadata

METADATA	DOKUMEN HUKUM
*Tipe Dokumen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peraturan Perundang-undangan</li><li>- Monografi Hukum</li><li>- Artikel Hukum (majalah, koran)</li><li>- Putusan Pengadilan/Yurisprudensi</li></ul>
*Judul	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi

# STANDARDISASI WEBSITE JDIH (PERMENKUM HAM RI 8 2019)

## Standar Metadata

METADATA	DOKUMEN HUKUM
*Tajuk Entri Utama (T.E.U.) Orang/Badan/Pengarang	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
*Nomor Peraturan/Putusan	Peraturan, Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
*Nomor Panggil	Monografi Hukum
*Jenis / Bentuk Monografi Hukum, Peraturan/Putusan	Peraturan, Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan/Putusan	Peraturan, Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Cetakan/Edisi	Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran)

# STANDARDISASI WEBSITE JDIH (PERMENKUM HAM RI 8 2019)

## Standar Metadata

METADATA	DOKUMEN HUKUM
Tempat Terbit	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Penerbit	Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan, Terbit, dibacakan	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Deskripsi Fisik	Monografi Hukum
Sumber	Peraturan, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi

# STANDARDISASI WEBSITE JDIH (PERMENKUM HAM RI 8 2019)

## Standar Metadata

METADATA	DOKUMEN HUKUM
Bahasa	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Lokasi	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Bidang Hukum	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Nomor Induk Buku	Monografi Hukum
Lampiran	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi

# STANDARDISASI WEBSITE JDIH (UU RI 14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi)

- ❑ KONTEN STATIS ( sesuai UU 14 2008 )
  - Profil
  - Kegiatan
  - Kinerja
  - Laporan Keuangan
  - Layanan
  - Pengadaan
  - Data
- ❑ KONTEN DINAMIS
  - Berita

Ps 9  
update  
min 6 bln  
sekali

Ps 11



# STANDARDISASI WEBSITE JDIH (PERMENKUM HAM RI 8 2019)

## Hak-Hak yang Harus Dihindari

- penggunaan bandwidth di internal instansi pengelola website tidak seimbang dengan bandwidth yang diperuntukkan bagi pencari informasi hukum agar tidak mengalami kesulitan akses.
- banyaknya konten foto atau image di halaman awal home karena website JDIHN lebih mengutamakan informasi hukum khususnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansinya.
- pencarian informasi melalui proses yang panjang.
- penggunaan password (kata kunci).



# PENGELOLAAN WEBSITE

---

## PENGELOLA



**PENANGGUNG JAWAB**



**PENGELOLA TEKNIS**



**PENGELOLA KONTEN**

# TUGAS PENANGGUNG JAWAB



- ❑ mengkoordinasikan pengelola teknis dan pengelola konten;
- ❑ menjamin penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- ❑ mengambil tindakan yang dianggap perlu guna menjamin kelancaran penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs

# TUGAS PENGELOLA TEKNIS



- ❑ menyelenggarakan sistem elektronik terkait Portal Web dan/atau Situs Web sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

# Tugas Pengelola Konten



- ❑ Mengelola konten yang meliputi perencanaan, penyediaan, pemilahan, pembersihan, penghapusan, pengolahan, dan distribusi terhadap konten yang menjamin kebenaran, keakuratan, dan kelengkapan dalam penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web.

# WEWENANG PENGELOLA KONTEN



- merencanakan konten yang akan dipublikasikan
- mencari dan mengumpulkan konten Portal Web dan/atau Situs
- memverifikasi dan menyusun konten Portal Web dan/atau Situs Web
- melakukan pengunggahan, penghapusan, pemutahiran konten dalam Portal Web dan/atau Situs Web
- mendokumentasikan pengelolaan konten dalam Portal Web dan/atau Situs Web.

# WEWENANG KONTRIBUTOR



- mengusulkan rencana konten yang akan dipublikasikan dalam Portal Web dan/atau Situs Web;
- melakukan mengumpulkan konten;
- mengolah dan menyusun konten siap dipublikasi;
- mengirimkan konten kepada editor sebelum didistribusikan untuk disetujui;
- melakukan rekapitulasi konten yang telah disusun.

# KEAMANAN INFORMASI

## Hak-Hak yang Harus Diperhatikan

- Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan harus memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi ( harus beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu;
- Penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web wajib mengikuti ketentuan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.





## Sinergitas Dengan Kominfo

- Colocation server JDIH di Data Center Pemprov Jatim;
- Aplikasi Cpanel reseller;
- Pembersihan junkfile;
- Keamanan akun CPanel

**PRODUK HUKUM PROV**

PERATURAN DAERAH

PERATURAN GUBERNUR

**PRODUK HUKUM PUSAT**

UNDANG-UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN

PERMENDAGRI

**PRODUK HUKUM DAERAH**

PERATURAN DAERAH

PERATURAN WALIKOTA

KEPUTUSAN WALIKOTA

INSTRUKSI WALIKOTA

**LAIN-LAIN**

RANCANGAN PERDA

PROPEM PERDA

KERJASAMA DAERAH

NASKAH AKADEMIK

Nomor

Tahun

Judul

Cari Peraturan

## Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Surabaya

Kumpulan Produk Hukum dan Informasi Hukum Kota Surabaya

# THANK YOU!



**DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Website:

<https://kominfo.jatimprov.go.id>

Email:

[kominfo@jatimprov.go.id](mailto:kominfo@jatimprov.go.id)

